

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO
TERHADAP KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA SKRIPSI**



Oleh:

ISNAINI KURNIA WJAYA

16323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO
TERHADAP KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas
Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ISNAINI KURNIA WIJAYA

16323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Terhadap
Kebijakan Poros Maritim Dunia**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh

derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

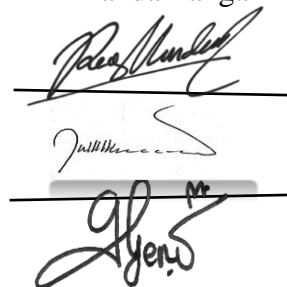


Hangga Fathana, S.IP., Bint.St., M.A

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I
- 2 Willi Ashadi, S.H.I., M.A
- 3 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A

Tanda Tangan



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Isnaini Kurnia Wijaya
No. Mahasiswa :16323005
Program Studi :Hubungan Internasional
Judul Skripsi : PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP
KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA.

Melalui surat ini menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila terbukti melanggar etika akademik saya siap menanganung resiko dan konsekuensi apapun.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan



Isnaini Kurnia Wijaya

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Tulisan saya yang luar biasa dan penuh perjuangan ini untuk:

Teguh Priohadi. Sos & Dra Suharni beserta keluarga besar hij sukemi dan keluarga Soekarajo dan

kaka saya tercinta Imam Bintang Kurniawan

Karena telah membantu, memberi doa dan dukungan baik bentuk materil dan dukungan yang lain selain itu juga memdidik dengan sangat cerdas .

Dosen – dosen HI yang sangat sabar dan cerdas dalam memdidik kader -kader pemimpin bangsa

Yang telah memberikan pengetahuan, dengan sabar dan Iklas mendidiki kader-kader bangsa

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur tidak lupa hanya untuk Allah Subhanallahu wa ta'alla yang telah memberikan kelancaran, stamina untuk tetap menyelesaikan segala tugas dan ketabahan atas cobaan yang dialami penulis. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang pasti dapat memberikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Keterlibatan semua orang, teman, sahabat, lawan dan berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung tentunya berdampak pada penyelesaian skripsi penulis entah baik maupun buruk. Namun, penulis sangat menikmati semua proses tersebut. Karena Tuhan tidak akan pernah salah menuliskan cerita hidup hamba-Nya dari kisah yang penuh cinta hingga terpuruk dalam kesedihan. Terima kasih tidak akan penulis hentikan hanya untuk dosen pembimbing skripsi. Tanpa dukungan, arahan dan ajaran beliau, penulis hanya akan terhenti untuk menyelesaikan skripsi. Sekali lagi, “terimakasih bu Dian telah sabar membimbing saya saya mengucapkan banyak terimakasih.”

Terakhir, penulis berharap hasil pemikirannya ini mampu berguna bagi semua orang khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dari Indonesia dan negara dunia yang lainnya serta mampu menjadi acuan untuk riset ke depan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-Nya untuk kita semua.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR BAGAN	6
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.7 Landasan Teori	11
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Jenis Penelitian	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	19
1.8.4 Proses Penelitian	20
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB 2	22
KEMARITIMAN DALAM POLITIK INDONESIA	22
2.1 Politik Domestik Indonesia pada Periode Pertama Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	22
2.2 Isu Kemaritiman dalam Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia	23
BAB 3	34
ANALISIS IDIOSINKRATIK KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA	34
3.1 Biografi Presiden Joko Widodo	34
3.2 Falsafah Hidup Presiden Joko Widodo	35
3.3 Karir Politik Presiden Joko Widodo	35
3.3.1 Walikota Surakarta	35
3.3.2 Gubernur DKI Jakarta	36
3.3.3 Presiden Indonesia	37
3.4 <i>Trait Analysis</i> Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	38
3.5 <i>Cognitive Analisis</i> Gaya Pengambilan Keputusan Presiden Joko Widodo dalam Politik Luar Negeri Poros Maritim Dunia	43
3.6 Dinamika Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tentang Poros Maritim Dunia	47
BAB 4	50

PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Sintetis Kerangka Pemikiran	14
Bagan 2 Dinamika Kasual Perubahan Kebijakan Luar Negeri	16



DAFTAR SINGKATAN

1	TNI-AL	Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut
2	KRI	Kapal Perang Indonesia
3	BMI	Benua Maritim Indonesia
4	PKBI	Program Kemitraan Bahari Indonesia
5	MPR RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
6	KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
7	ASEAN	<i>Association of SouthEast Asian Nations</i>
8	IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
9	PLBN	Pos Lintas Batas Negara
10	DI	Darul Islam
11	TTI	Tentara Islam Indonesia
12	PRRI	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
13	APRA	Angkatan Perang Ratu Adil
14	CADEK	Catur Dharma Eka Karma
15	UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law Of the Sea</i>
16	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
17	PM	Perdana Menteri
18	MDA	<i>Maritime Domain Awareness</i>
19	MEF	<i>Minimum Essential Force</i>
20	CSIS	<i>Centre for Strategic and International Studies</i>
21	SLOC	<i>Sea Line of Communication</i>
22	ALKI	Alur Laut Kepulauan Indonesia
23	IORA	<i>Indian Ocean Rim Association</i>
24	PDIP	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan
25	PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
26	PAN	Partai Amanat Nasional
27	PKS	Partai Keadilan Sejahtera
28	PDS	Partai Damai Sejahtera
29	DKI	Daerah Khusus Ibukota
30	Nasdem	Nasional Demokrat
31	Hanura	Hati Nurani Rakyat
32		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
	PKPI	
33	Golkar	Golongan Karya
34	Capres	Calon Presiden
35	Cawapres	Calon Wakil Presiden
36	PPP	Partai Persatuan Pembangunan
37	PBB	Partai Bulan Bintang
38	KPU	Komisi Pemilihan Umum
39	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
40	KAA	Konferensi Asia Afrika
41	ABK	Anak Buah Kapal
42	BAKAMLA	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
43	SDM	Sumber Daya Manusia
44	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
45	MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>

ABSTRAK

Poros Maritim Dunia pada dasarnya bukan sebuah hal yang baru, selain legitimasi dari kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya di masa lampau, Poros Maritim Dunia menjadi sebuah respon atas Jalur Sutra Maritim yang digaungkan oleh China. Gagasan Poros Maritim Dunia yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo menjadi angin segar bagi strategi kemaritiman Indonesia, pasalnya selama ini wilayah maritim sering terabaikan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Aspek ekonomi yang disebut geoekonomi dan aspek keamanan menjadi dua hal yang disorot oleh Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinan. Respon negatif dari negara lain bermunculan pasca upaya penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia terhadap para nelayan-nelayan pencuri ikan di perairan Indonesia. Negara Vietnam, Thailand dan Malaysia, memberikan respon negatif terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berbeda hal dengan China yang memberikan dua respon, China secara langsung memberikan respon negatif terhadap penenggelaman kapal-kapal nelayannya, namun disisi lain China juga memberikan respon positif terhadap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di kawasan maritime, kerana China melihat peluang investasi dari aspek pembangunan. Secara tidak langsung China melakukan sentimen negatif terhadap Indonesia apabila kebijakan pemerintah Indonesia merugikan China, dan memberikan respon positif apabila kebijakan pemerintah Indonesia menguntungkan China. Melalui analysis teori *Idiosinkratik* atas gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo diatas, hasil dari penelitian ini adalah, gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama bersifat tegas pada sisi penegakkan hukum namun cenderung lembut dalam sisi investasi pembangunan di wilayah maritim Indonesia.

Kata kunci: Poros Maritim Dunia, Gaya Kepemimpinan, Joko Widodo, Teori *Idiosinkratik*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak di (*cross-position*) antara dua benua dan dua samudra, selain itu masyarakat secara umum juga mengenal Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau mencapai 17.499 pulau, dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Sebagai negara kepulauan, wilayah laut menjadi pemisah wilayah daratan. Kedudukan Indonesia yang menjadi negara kepulauan memiliki kedudukan yang sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki wilayah geografis perairan lainnya, seperti: kontinental, negara pantai, dan *landlocked* (Indrawati and Nugroho 2019).

Dengan melihat kondisi Indonesia dari definisi diatas maka diperlukan sebuah strategi maritim yang komprehensif dan dapat mengikuti perubahan zaman yang semakin dinamis dan membawa kemaritiman kearah yang terus berkembang di setiap zamannya (Laksono 2018).

Apabila melihat jauh ke belakang tentang sejarah kemaritiman Indonesia, sejarah kemaritiman sudah dimulai sejak lama, bahkan sejak sebelum adanya negara Indonesia itu sendiri, negara-negara maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi *role model* bagi Indonesia dalam hal penguasaan kemaritiman di wilayah kekuasaannya. Masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit berlangsung cukup lama, kemudian jauh setelahnya saat memasuki era penjajahan Belanda di Nusantara, isu kemaritiman meredup dan bahkan nelayan yang bekerja menggantungkan hidupnya di laut dipandang sebagai kasta terbawah dalam

masyarakat. Dogma-dogma yang dibangun tentang kasta nelayan menjadi kasta terendah, menjadikan wilayah maritim semakin dijauhi oleh masyarakat (Laksono 2018).

Selepas masa penjajahan perkembangan kemaritiman Indonesia mulai kembali pada masa akhir orde lama, hal ini dilatarbelakangi karena adanya berbagai macam ancaman-ancaman dan konflik di wilayah laut Indonesia. Presiden Soekarno kemudian membantu TNI-AL (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut) dan diperkuat dengan adanya pengadaan KRI (Kapal Perang Indonesia) Irian. Kapal perang ini menjadi salah satu senjata utama yang dimiliki Indonesia untuk menjaga wilayah maritim. Pada masa-masa orde lama maupun orde baru isu kemaritiman hanya berhenti pada pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman atau isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang terdapat di wilayah laut Indonesia belum terlalu dipertimbangkan (Yanyan M. Yani and Ian Montratama 2015).

Pada orde baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto isu kemaritiman kembali diangkat melalui doktrin tentang Benua Maritim Indonesia (BMI), namun karena tidak adanya kebijakan yang konkrit untuk dijalankan, kebijakan ini pun akhirnya tenggelam dengan sendirinya. Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran akan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan banyak muncul pada masa awal reformasi, perkembangan kemaritiman Indonesia semakin meningkat pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dibentuk Departemen Eksplorasi Laut yang menjadi cikal bakal Kementerian Perikanan dan Kelautan, dibentuknya Departemen Eksplorasi menjadi sebuah gagasan baru

tentang kemaritiman Indonesia, isu kemaritiman yang selama ini berhenti pada aspek keamanan kemudian berkembang pada aspek ekonomi dengan mencoba memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah laut Indonesia. Perkembangan kemaritiman Indonesia berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dimana melalui diangkatnya Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS adalah diangkatnya beliau sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001 dan kembali diangkat pada Kabinet Gotong Royong pada masa pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Diangkatnya Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS menjadi upaya Presiden Megawati Soekarnoputri dalam meningkatkan wilayah maritim di Indonesia.

Pada Januari 2002, Husni Manggabarani diangkat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menggantikan Rokhmin Dahuri. Pada periode kepemimpinannya Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah berhasil menyelenggarakan berbagai macam program pembangunan pada wilayah kelautan dan perikanan. Pada Juli 2002, Widi Agoes Pratikto diangkat menjadi Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang ketiga. Pada masa kepemimpinan Widi Agoes Pratikto eksistensi lembaga Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terkenal oleh masyarakat luas dengan melalui media. Melalui Slogan yang diusung adalah TEAMS (*Trust, Empowerment, Aims, Measures, dan Support*). Pada masa kepemimpinannya lahir program Program Kemitraan Bahari Indonesia (PKBI) atau *Sea Partnership Program*. Dengan menggandeng Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga terkait lainnya sebagai upaya untuk pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil (Yanyan M. Yani and Ian Montratama 2015).

Isu Maritim di Indonesia terus berlanjut di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan kemaritiman Indonesia didorong dengan kehadiran *asas cabotage* yang membawa sinyal positif bagi kemajuan pelayaran. “Melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian diundangkan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran” (Republik Indonesia 2008). *Asas cabotage* diterapkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi kedaulatan negara Indonesia serta membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut di Indonesia untuk mendapatkan muatan (Republik Indonesia 2008). Kebijakan ini berhasil membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Strategi yang dilakukan ini dapat meningkatkan jumlah kapal angkut di wilayah perairan Indonesia yang berbendera Indonesia dan dengan didorong oleh peningkatan kapasitas angkut dari setiap kapal, pada tahun 2014, dengan adanya strategi ini mampu meningkatkan jumlah kapal yang berbendera Indonesia menjadi 14 ribu unit (Yanyan M. Yani and Ian Montratama 2015).

Perjuangan tentang maritim di Indonesia ini kemudian diteruskan oleh Presiden Joko Widodo, dan dibawa menjadi janji kampanye calon presiden pada tahun 2014. Setelah terpilih, Presiden Joko Widodo menunjukkan kesungguhannya dalam isu kemaritiman. Pada pidato kemenangan Presiden Joko Widodo pasca pemilu pada tanggal 22 Juli 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo akan berfokus pada isu maritim. Dalam pidato pengukuhan pada tanggal 20 Oktober 2014 di MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan “Kita harus melakukan upaya yang solid untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara samudera. Laut, saluran air, dan

teluk adalah jangka panjang dari kemajuan manusia kita. Kita telah membelakangi lautan terlalu lama, punggung kita di lautan, saat ini adalah saatnya kita mengembalikan semuanya ke lautan kita” (Madu 2018).

”Isu maritim juga tertulis dalam Nawacita yang menjadi acuan politik domestik dan politik luar negeri Indonesia pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berisi tentang poin-poin berikut ini: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. (8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga” (Madu 2018).

Dalam politik luar negeri Presiden Joko Widodo, pertama kali disampaikan dalam selain dalam KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar kemudian diulangi kembali pada forum Indonesia Summit di Beijing dan Pelabuhan Nanjing, Presiden Joko Widodo membawa gagasan tentang poros maritim dunia atau *Global Maritime*

Fulcrum dengan hadirnya 5 unsur yakni; budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, ketahanan maritim, dan diplomasi maritim. Presiden Joko Widodo dan para menteri-mentrinya membawa agenda pembangunan baru Indonesia, yang menjadi poros utama dari agenda pembangunan Indonesia baru adalah kebijakan Poros Maritim (*maritime axis*) Dunia. Kebijakan pembangunan Indonesia baru ini menegaskan arah pembangunan Indonesia pada pembangunan pada sektor kelautan. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek kelautan dan berlaku dalam masa pemerintahannya dalam rentang waktu tahun 2015-2019 (Junef 2019).

Berbagai kebijakan dari Presiden Joko Widodo tentang isu kemaritiman baik dalam ruang lingkup dalam negeri maupun luar negeri tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Melalui Teori Idiosinkratik kepemimpinan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang *political personality profile* (profil kepribadian politik), *leadership style* (gaya kepemimpinan), dan *decision making style* (gaya pengambilan keputusan) (Le Mière 2018).

Mengingat betapa isu kemaritiman menjadi fokus dalam politik luar negeri Indonesia, serta kekhasan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka analisis mengenai pengaruh karakter kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan poros maritim dunia penting dan menarik untuk dikaji dengan teori Idiosinkratik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pengaruh Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profil kepribadian politik Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan poros maritim dunia.
2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan poros maritim dunia.
3. Untuk mengetahui pengaruh gaya pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan poros maritim dunia.
4. Sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasi ilmu yang telah dipelajari dalam studi Hubungan Internasional

1.4 Cakupan penelitian

Sejarah panjang tentang maritim di Indonesia dimulai bahkan sejak sebelum negara Indonesia berdiri, kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menjadi *role model* bagi Indonesia saat ini untuk menjadi poros maritime dunia, yang kemudian terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan keadaan. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo isu maritim kembali menguat, tidak hanya berfokus pada aspek kedaulatan namun juga membawa misi ekonomi. Sejarah panjang tentang maritime di Indonesia inilah yang melandasi penelitian ini, sehingga tujuan utama penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan gaya kepemimpinan diantaranya: *political personality profile*, (Profil Politik) *leadership style* (Gaya Kepemimpinan) dan *decision making style* (Gaya Pengambilan Keputusan) Pada *political personality perofil*, dimana point- point tersebut berkaitan erat dengan proses dalam pembuatan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo tentang kebijakan dalam upaya mendorong Indonesia

menjadi poros maritim dunia pada periode pertama menjabat Presiden tahun 2014-2019.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian dengan judul “Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya”, yang dilakukan oleh Poltak Partogi Nainggolan pada tahun 2015. Temuan memperlihatkan respons negara lain yang tidak konsisten dalam kebijakan investasi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, serta munculnya sikap yang kritis dan bahkan asertif terhadap penegakan hukum di laut Indonesia, artinya adalah perlu adanya tindakan tegas yang menjadi simbol kekuatan Indonesia dalam hal kemaritiman, sehingga kebijakan yang diambil oleh Indonesia dapat diterapkan (Nainggolan 2015). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas diketahui bahwa penelitian tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “Kebijakan Poros Maritim Joko Widodo dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia” yang dilakukan oleh Fikry Cassidy, Partogi J.P. Samosir, Debbi Oktarossa, Erry Wahyu Prasetyo, Faiz Ahmad Nugroho, Widya Fitri, dan Robertus Aji Putro (Cassidy et al. 2018) Sampul. Hasil kajian pada penelitian ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas pertahanan dan keamanan. Upaya sinergitas antara fungsi ekonomi dan keamanan di wilayah laut ini menjadi dasar suksesnya pembangunan (Cassidy et al. 2018). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas diketahui bahwa penelitian tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “Implementasi Poros Maritim Dalam Perspektif Kebijakan” yang dilakukan oleh Muhar Junef pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa cita-cita untuk menjadikan Indonesia yang selama ini digaungkan melalui kebijakan-kebijakan belum maksimal sehingga perlu adanya strategi yang tepat untuk membawa Indonesia menjadi poros maritime dunia (Junef 2019). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa penelitian tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim” yang dilakukan oleh Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah pada tahun 2019. Temuan pada penelitian ini Diplomasi Maritim sebagai salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya dan mendorong pengembangan diplomasi maritim Indonesia yang sejalan dengan kebijakan maritim Indonesia. Diplomasi yang selama ini dilakukan mengarah pada aspek yang mendorong upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, meskipun banyak tekanan dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia, diplomasi maritim kemudian berkembang baik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Kusumawardhani and Arie Afriansyah 2019). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa penelitian tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Koneksi Maritim” Oleh Lisbet Pujayanti, Adirini Roza, Rizki pada tahun 2019. Hasil kajian

pada penelitian ini mendeskripsikan pentingnya sinergi antara kelembagaan dalam bingkai kebijakan Poros Maritim dunia. Pendekatan diplomasi sebagai upaya untuk menjaring dukungan dari berbagai negara dalam upaya mendorong suksesnya kebijakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Lisbet, Pujayanti, and Roza 2019). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa penelitian tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “*Strengthening the global maritime fulcrum concept through the inclusion of the bioecoregion connectivity aspect (A case study of the south coast of West Java, Indonesia)*” yang dilakukan oleh Nurhayati, Atikah Aisah, Isah Supriatna, Asep K.pada tahun 2019 . Hasil kajian pada penelitian ini mendeskripsikan pentingnya strategi yang berkualitas sebagai alat untuk mendorong terwujudnya cita-cita menjadi poros maritim dunia. Strategi yang dimaksud pada penelitian ini berkaitan erat dengan kondisi yang terjadi dilapangan, studi kasus pada pantai selatan jawa barat Indonesia menjadi sebuah gambaran pentingnya strategi yang tepat dalam menyikapi kondisi yang terjadi di lapangan (Nurhayati, Aisah, and Supriatna 2019). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa penelitian tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “*Thomas Hardy's Idiosyncratic Mode of Regard*” yang dilakukan oleh Lawrence Jones pada tahun 2015. Hasil kajian pada penelitian ini mendeskripsikan tentang gaya-gaya pemimpin dunia yang dilihat dari teori *Idiosyncratic*. Dimana pemimpin dengan karakter yang kuat ditinjau dari teori *idiosyncratic* adalah yang mampu membawa arah keingin tujuannya pada satu

upaya yang nyata. Dalam penelitian ini menjelaskan kecenderungan pemimpin akan membawa arah kepemimpinannya berdasarkan dengan tiga hal diantaranya: *political personality profile*, (Profil Politik) *leadership style* (Gaya Kepemimpinan) dan *decision making style* (Gaya Pengambilan Keputusan) (Jones 2015). Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa penelitian tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim dunia belum dikaji lebih lanjut.

1.7 Landasan Teori

Teori Idiosinkratik adalah salah satu teori yang dapat digunakan dalam menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang, terkhusus seorang pemimpin. *Idiosyncratic* atau idiosinkratik merupakan gabungan dari kata *ideology* dan *syncretic* (Le Mière 2018)..

“ Menurut Antonio Gramsci Ideologi didefinisikan sebagai sebuah kerangka atau paradigma analisis yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, dan *syncretic* adalah perpaduan semua hal baik dari semua yang ada”. Teori Idiosinkratik sebagai salah satu alat analisis politik luar negeri suatu negara apabila pengaruh atau kebijakan luar negeri dibuat oleh seorang individu dan individu ini menjadi penentu kebijakan pusat. Konsep Idiosinkratik berkaitan erat dengan sudut pandang, karakter, dan ciri khas pribadi dari individu pembuat kebijakan (Jones 2015). Kondisi-kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap karakter pemimpin. Lingkungan sosial atau kondisi keluarga secara tidak langsung akan membentuk karakter masing-masing individu pemimpin dan berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan individu pemimpin tersebut. Dampak besar

dari Idiosinkratik apabila seorang individu pemimpin bersikap pragmatis dalam mengambil keputusan. Bentuk Negara juga memegang peran penting dalam melihat teori Idiosinkratik dari diri seorang pemimpin, bentuk Negara erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, negara demokrasi yang dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah akan berbeda dengan negara komunis yang dimana keputusan menjadi otoritas pribadi pemimpin. Bentuk negara ini akan menentukan seberapa besar pengaruh seorang pemimpin melalui pengambilan keputusannya (Jones 2015).

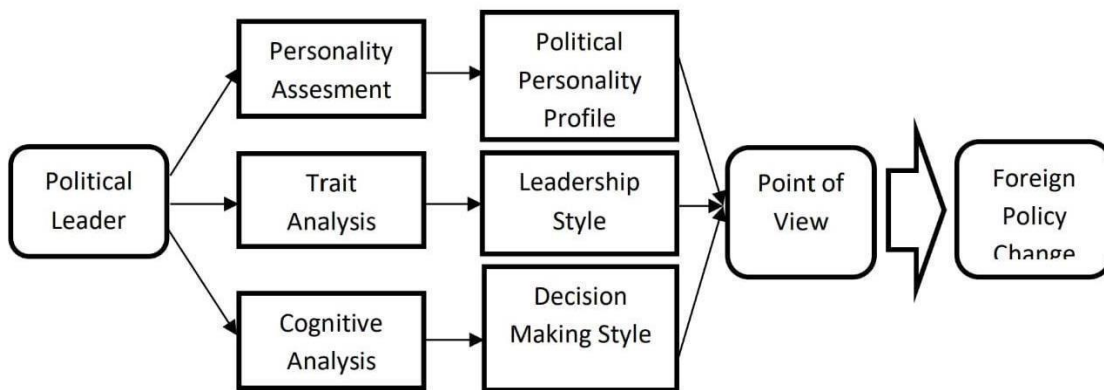
Karakteristik yang dimiliki individu seorang pemimpin menjadi penekanan utama dari teori idiosinkratik dalam hal membuat suatu keputusan. Kebijakan dalam sebuah negara bersumber dari keputusan individu pemimpin negara. Sehingga kualitas individu pemimpin menjadi penentu kualitas kebijakan yang dilakukan oleh negara. Pemimpin politik dapat membawa pemerintahan ke arah agresif atau menuju hubungan damai dengan negara lain Hermann, 1980 dalam (Laksono 2018).

Pengambilan keputusan atau gaya kepemimpinan individu pemimpin dapat dikaitkan dengan motivasi politik dan lingkungan politik atau kebijakan di sekitarnya dimana mereka memerlukan sumber referensi dalam memproduksi sebuah keputusan (Laksono 2018).

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin juga tidak terlepas dari *background* gaya kepemimpinannya, penasihat-penasihat terdekatnya, dan pola individu pemimpin dalam melakukan pemrosesan informasi yang didapatkan dalam membuat sebuah keputusan. Berikut terdapat bagan yang

menjelaskan mengenai pandangan pemimpin politik yang dapat menentukan sebuah kebijakan politik, terkhusus tentang kebijakan luar negeri (Laksono 2018).

Bagan 1 Sintetis Kerangka Pemikiran



Sumber: Jerrold M Post, Margaret G. Hermann, dan Peter Suedfeld et al dalam Jerrold M Post, *The Psychological Assessment of Political Leaders*, (USA: The University of Michigan Press, 2006) dalam Laksono, 2018.

Bagan diatas menjelaskan mengenai analisa idiosinkratik seorang pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan.tersebut menjelaskan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan melalui analisis teori idiosinkratik ada tiga indikator. pertama *personality assessment*, yang kedua *trait analysis* dan yang terakhir *cognitive analisis*. dalam tiga indikator tersebut mengarah pada analisis *political personal profile*, *leadership style* dan *decision making style*. pertama *personality assessment* terdapat *political personality profile* dimana dalam pembuatan kebijakan dapat dipengaruhi oleh *personality assessment* dalam membuat sebuah kebijakan kebijakan tersebut dapat menggambarkan seorang pemimpin memiliki kondisi psikologi yang menyeluruh, analisis tersebut tidak hanya menggambarkan biografi perjalanan hidup seorang pemimpin yang dapat membuat pemimpin

memiliki sikap inti akan tetapi juga menentukan aspek-aspek tertentu yang membuat perilaku seorang pemimpin menjadi relevan. (Laksono, 2018). Kedua adalah *Trait analysis* mengarah pada analisis *leadership style* dalam analisis ini beberapa tipe-tipe pemimpin antara lain paranoid personality, ego-defense, narcissist, dan obsessive-compulsive lam indikator ke dua ini ada beberapa cara untuk melihat tipe pemimpin salah satunya adalah teknik wawancara dimana pemimpin dapat dilihat bagaimana menanggapi pertanyaan wawancara hal tersebut dapat menjadi salah indikator pemimpin tersebut tinggi atau rendah dalam suatu sifat dalam analisis ini juga dapat mengamalkan keberhasilan politik, hal tersebut juga dapat membuat sebuah pola komunikasi terhadap lingkungannya seperti komunikasi dengan penasehat dan orang-orang dekat. (Laksono, 2018). Ketiga adalah *Cognitive Analisis* analisis yang mengarah kepada *Decision Making style* dalam analisis dapat dilihat bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan situasi dan karakteristik pemimpin tersebut. (Laksono, 2018)

Terdapat tiga landasan pemimpin sebelum membuat kebijakan yaitu: *political personality profile*, *leadership style*, dan *decision making style*. Pada *political personality profile*. Tiga aspek diatas memberikan gambaran bahwa kepribadian pemimpin dan gaya kepemimpinan menjadi motor penggerak sebuah kebijakan (Laksono 2018).

Menurut teori idiosinkratik *Political personality profile*, atau profil politik dari seorang pemimpin menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Profil politik atau pengalaman pada jabatan-jabatan politik

sebelumnya akan menjadi sebuah bagian dari proses dalam pengambilan keputusan ataupun dalam hal gaya kepemimpinan (Jones 2015).

Leadership style adalah cara yang digunakan dalam mengamankan keberhasilan politik pemimpin. Dalam proses mengamankan kepemimpinan politik seorang pemimpin juga menggunakan *Leadership style* sebagai metode yang digunakan dalam menjalin komunikasi dengan orang terdekat, seperti penasehat, menteri-menteri, konstituen dan melihat hubungan yang berlaku berdasarkan ketentuan aturan yang ada (Jones 2015).

Selanjutnya, *decision making style* adalah sebuah perwujudan dari *leadership style* dimana pengambilan sebuah keputusan yang dinamakan sebagai *decision making style* sebagai alat ukur untuk melihat kepemimpinan seseorang. Dua element dalam *decision making style*, yaitu *situational characteristics* (karakteristik situasional) atau pengaruh situasional adalah pengaruh yang terjadi secara sementara dari seorang pemimpin dan *problem characteristics* (karakteristik masalah), dimana pemimpin dapat menganalisis setiap kondisi permasalahan maupun tantangan yang dihadapi (Jones 2015).

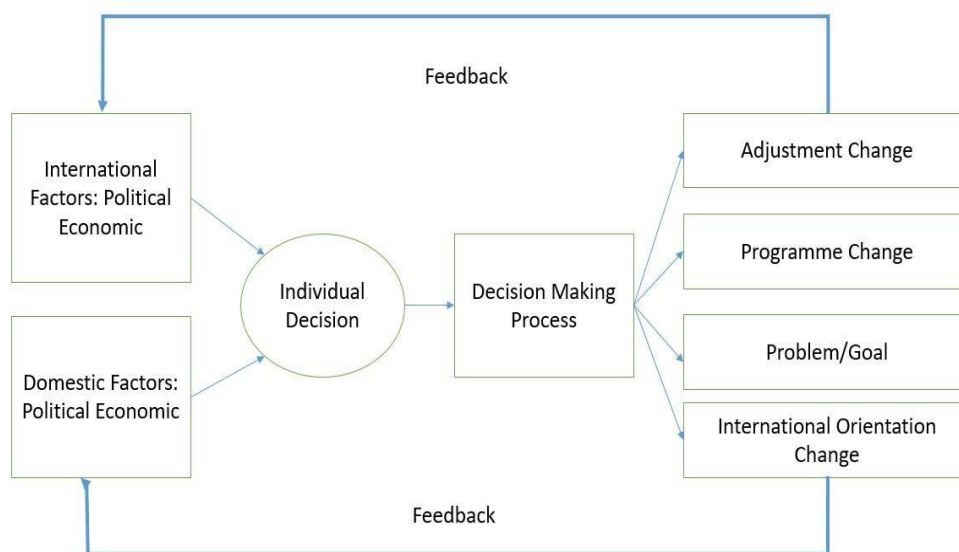
Sesuatu hal memungkinkan perubahan kebijakan luar negeri, sehingga kebijakan tersebut akan memiliki kecenderungan untuk terus berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan nasional maupun global. Perubahan ini bertujuan untuk mencapai tujuan besar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Latar belakang dalam perubahan kebijakan luar negeri adalah beberapa hal berikut ini, yaitu:

pertama, perubahan kebijakan yang diakibatkan dari adanya perubahan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan atau adanya transformasi dalam

bernegara. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan pandangan politik pemimpin negara (Laksono 2018).

Kedua, perubahan kebijakan yang terjadi akibat adanya perubahan arah pandang dari kebijakan luar negeri ke fokus yang baru. Perubahan ini terjadi ketika penguasa pemerintah memiliki sudut pandang baru dalam kebijakan luar negeri. Perubahan ini dasarnya lebih mengarah pada upaya perbaikan atas kebijakan sebelumnya (Laksono 2018). Dibawah ini merupakan bagan perubahan kebijakan luar negeri.

Bagan 2 Dinamika Kasual Perubahan Kebijakan Luar Negeri



Sumber: "Jakob Gustavsson, The Politics of Foreign Policy Change Explaining The Swedish Reorientation On EC Membership, 1999, hlm. 25 dalam Laksono, 2018".

Bagan 2 menjadi gambaran umum atas dinamika perubahan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor internasional maupun faktor dalam negeri. Individu pemimpin memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perubahan kebijakan luar negeri. Beberapa hal yang mempengaruhi keputusan seorang

individu pemimpin dalam perubahan kebijakan luar negeri, yakni *Adjustment Changes*, *Program Changes*, *Problem/Goal Changes*, dan *International Orientation Changes*. Hermann, 1990 dalam (Laksono 2018).

Pertama, *Adjustment Changes* yaitu perubahan yang dilakukan dalam upaya penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. Perubahan ini hanya mengarah pada metode atau strategi dari kebijakan luar negeri, dan tanpa merubah tujuan utama kebijakan luar negeri.

Kedua, *Program Changes*, perubahan ini mengarah pada perubahan program kerja dari kebijakan luar negeri. Perubahan ini umum terjadi, karena perubahan situasi dan kondisi yang ada menuntut perubahan atas program-program yang tidak berjalan dengan baik.

Ketiga, *Problem/Goal Changes*, perubahan ini mengarah pada perubahan yang lebih besar, dimana perubahan terjadi pada arah atau tujuan kebijakan atau perubahan orientasi pada kebijakan luar negeri. Perubahan ini didasari oleh perubahan tujuan atau orientasi kebijakan luar negeri, tujuan dari arah kebijakan luar negeri yang sudah tidak relevan maka akan segera diubah.

Keempat, *International Orientation Changes*, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perubahan pada orientasi internasional pada kebijakan luar negeri. Perubahan kebijakan luar negeri yang didasari oleh faktor ini *International Orientation Changes* membuat perubahan yang mendasar peran negara dalam aktivitas internasional. Hal ini terlihat pada bukan hanya satu kebijakan saja, melainkan banyak yang kurang atau lebih secara bersamaan berubah Hermann, 1990 dalam (Laksono 2018).

Selanjutnya, peran dari setiap negara dalam sebuah kebijakan internasional selalu membawa umpan balik. Adanya perubahan kebijakan internasional dari sebuah negara maka akan berpengaruh terhadap faktor internasional maupun domestik yang menjadi pertimbangan dalam menentukan perubahan kebijakan luar negeri.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan poros maritime dunia. Apabila ditinjau lebih dalam terdapat tiga hal yang mendorong proses pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan poros maritime dunia. Diantaranya terdiri dari: *political personality profile*, *leadership style*, dan *decision making style*, pada *political personality profile*. Tiga hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu, *Foreign Policy Change* (poros maritim dunia). Dalam argument sementara pada penelitian ini, tiga hal diatas menjadi instrumen penting yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo dalam menentukan setiap kebijakan yang berkaitan erat dengan kebijakan poros maritim dunia. Hal ini tercermin dari pidato- pidato yang disampaikan serta kebijakan yang sudah di tetapkan selama tahun 2014 hingga 2019.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif sebagai alat untuk pemecahan masalah dalam penelitian. Metode kualitatif digunakan

sebagai alat untuk menjabarkan hasil penelitian secara utuh. Variabel pada penelitian ini berupa alasan, persepsi, motivasi, ide dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dijelaskan melalui angka, oleh sebab itu menggunakan pendekatan metode kualitatif.

Data pada penelitian ini menjadi faktor yang paling penting. Data pada penelitian ini diperoleh melalui dokumen, tinjauan literatur atau studi kepustakaan, dan keabsahan data. Sehingga tingkat akurasi data dapat dipertanggung jawabkan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Indonesia. Objek penelitian gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait dengan kebijakan poros maritim dunia, yang didalamnya memuat berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan strategis tentang poros maritim dunia

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan pada beberapa sumber-sumber resmi, dengan tanpa merubah struktur data. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keabsahan data-data, sehingga masih terjaga korelasinya antara data-data dan teori-teori yang terdahulu.

Pengumpulan data pada penelitian ini mengarah pada data sekunder. Selanjutnya peneliti menganalisis data sekunder yang didapatkan untuk kemudian membuat kesimpulan sementara yang menjadi hipotesis awal penelitian. Analisis data sekunder menace pada perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam mengangkat masalah penelitian. Pendekatan ini akan

memberikan sudut pandang yang berbeda dari setiap penelitian meskipun menggunakan data yang sama.

Untuk memenuhi kebutuhan data, pengumpulan dan pencarian dilakukan dengan mengakses internet atau laman web. Pencarian data melalui internet dilakukan hanya untuk mengumpulkan informasi yang berdasarkan fakta dan mengandung kebenaran tentang topik atau informasi atas peristiwa yang diteliti sebagai data pendukung. Penelitian tersebut menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang berasal dari studi pada buku, jurnal, artikel dan surat kabar serta memanfaatkan situs berita yang tersedia secara bebas dan situs resmi lainnya.

1.8.4 Proses Penelitian

Analisis data kualitatif dimulai dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah kata yang terstruktur dan bersifat kesimpulan. Peneliti harus memeriksa keabsahan data sebelum mengambil kesimpulan. Karena data yang digunakan adalah data sekunder sehingga keabsahan data menjadi hal yang wajib dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2005).

Data sekunder harus memenuhi aspek-aspek berikut, tidak menjadi hak kekayaan intelektual, data yang disajikan sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian dan membawa perbedaan pada rumusan masalah. Dari langkah tersebut menghasilkan data yang kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan proses menentukan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian penting dalam proses penulisan penelitian ini. Tujuan dari system pembahasan adalah untuk membuat penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah. Pembahasan dalam penelitian terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut ini adalah rincian dari sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab 1: Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang menjadi landasan dasar dan gambaran secara umum mengenai tahapan-tahapan dalam penulisan skripsi. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian (jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan proses penelitian) dan sistematika pembahasan.

Bab 2: Kemaritiman dalam politik Indonesia

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi politik domestik Indonesia pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan isu kemaritiman dalam sejarah politik luar negeri Indonesia.

Bab 3: Analisis idiosinkratik kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan poros maritime dunia

Bab ini berisi pembahasan tentang biografi Presiden Joko Widodo, Falsafah hidup Presiden Joko Widodo dan karir politik Presiden Joko Widodo yang memuat tentang masa jabatan Presiden Joko Widodo dari Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia. Selanjutnya pada bab ini juga membahas tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, gaya pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo dalam politik luar negeri

poros maritime dunia dan dinamika perubahan kebijakan luar negeri Indonesia tentang poros maritime dunia.

Bab 4: Penutup

Bab terakhir pada skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kajian penelitian ini. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang diambil dari hasil pembahasan. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah upaya untuk mendukung penelitian selanjutnya serta perbaikan yang diajukan kepada pihak-pihak terkait.



BAB 2

KEMARITIMAN DALAM POLITIK INDONESIA

2.1 Politik Domestik Indonesia pada Periode Pertama Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Kabinet kerja menjadi nama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2014-2019. Selama lima tahun kepemimpinan, sejak Oktober 2014, terdapat berbagai macam program-program yang dilakukan oleh pemerintahan kabinet kerja sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik domestik.

Dalam buku yang dirilis oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dengan judul *Lima Tahun Bersama*, publik dapat dengan jelas melihat kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun. Baik pencapaian dalam bidang ekonomi maupun dalam upaya menjaga stabilitas politik (Indonesia and Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019).

Dalam buku *Lima Tahun Bersama*, stabilitas politik dalam negeri diupayakan untuk terus dijaga dengan mewujudkan rasa aman serta memastikan ruang dialog untuk meningkatkan kualitas demokrasi, namun jika melihat data kehidupan demokrasi Indonesia yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, IDI Indonesia menurun, dimana pada tahun 2014 IDI Indonesia pada angka 73,04 persen, tahun 2016 menjadi 70,09, dan 72,39 pada tahun 2019 (Indonesia and Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014-2019 juga menaruh perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah terluar yang berbatasan langsung

dengan negara-negara tetangga, dengan melakukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bertujuan untuk meningkatkan marwah Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan bermartabat. Selain itu pertahanan nasional juga terus ditingkatkan dengan adanya kerjasama produksi alutsista persenjataan Indonesia sebagai upaya memperkuat militer Indonesia. Upaya membentengi Indonesia dari berbagai macam ideologi-ideologi asing yang mengancam kedaulatan Indonesia juga terus dilakukan sebagai bentuk pertahanan, dengan program pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi terus dilakukan secara komprehensif, sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat (Indonesia and Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019).

2.2 Isu Kemaritiman dalam Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia

Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang hidup pada abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14 sukses menjadi sebuah kerajaan yang tidak hanya menguasai wilayah daratan, namun juga berkuasa di wilayah maritimnya. Kesuksesan dari kerajaan Sriwijaya di wilayah maritime dibuktikan dengan adanya pemebangun hub-ports yang sangat terkenal pada masanya di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit juga tidak hanya berkuasa di wilayah daratan saja, kekuatan maritimnya menjadi salah satu kekuatan terbesar pada zaman dulu. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan atas lima kapal perang terkuat pada zaman itu. Catatan sejarah tersebut menjadi legitimasi bahwa kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau atas wilayah maritim (Cassidy et al. 2018).

Kesuksesan yang telah dicapai oleh Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya menjadi citra diri yang positif bangsa Indonesia di era jauh sebelum poros maritime dunia diluncurkan. Masa kejayaan bangsa Indonesia di wilayah

maritimnya yang dibangun oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit berakhir kelam saat bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Penjajahan ini melakukan pembatasan terhadap bangsa Indonesia untuk memanfaatkan laut, salah satunya dengan membuat sebuah propaganda yang menganggap nelayan sebagai kasta terbawah dalam status sosial (Cassidy et al. 2018). Perkembangan bangsa Indonesia untuk kembali ke wilayah maritimnya terjadi secara perlahan, seperti yang terjadi pada akhir era orde lama, bangsa Indonesia melihat bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya di wilayah daratan saja namun wilayah laut harus juga diperkuat, karena menjadi jalur masuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang terjadi selama berabad-abad. Pengadaan kapal perang KRI Irian menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkan trayektori tersebut (Cassidy et al. 2018).

Pada awal-awal perkembangan kembalinya fokus Indonesia kepada wilayah maritime sikap Negara Indonesia cenderung *inward-looking*, melihat dari persepsi ancaman, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam pemberontakan yang terjadi di wilayah maritim Indonesia, seperti: DI/TII, PRRI/ Permesta, Kahar Muzakkar, Andi Azis, *Westerling*, APRA, dan ancaman-ancaman dari luar untuk membentengi pengaruh ideologi asing. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, strategi maritim dianggap sebagai subordinasi dari strategi daratan yang menjadi bagian dari administrasi junta militer yang dipimpinnya (Cassidy et al. 2018). Wilayah maritime tidak terlalu dipandang dan laut diartikan sebagai sebuah parit besar yang menjadi banteng negara Indonesia dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar, Angkatan Laut Indonesia berada pada lapis pertama pertahanan nasional. Pada doktrin CADEK dan Tri Ubaya Cakti, kapal-kapal perang dianggap sebagai

'benteng' pertama yang menghalau ancaman dari luar di wilayah perairan. Pada era pra-poros maritim dunia, kecenderungan isu-isu kemaritiman adalah *state-to-state*. Contoh adalah dalam menghadapi peristiwa besar seperti peristiwa Dwikora, konfrontasi dengan Malaysia dan hendak mengambil alih Kalimantan Utara.

Catatan sejarah yang menjadi bukti komitmen Indonesia pada masa pasca kemerdekaan dalam menerapkan strategi maritime di era par-poros maritime dunia. Beberapa di antaranya adalah:“ (1) Konsep Indonesia tanah air tumpah darah, (2) Sejarah perang laut dan amfibi, (3) Deklarasi Juanda, (4) UNCLOS, (5) Pembentukan DEL dan DMI, dan (6)'Negara Kepulauan' versi RPJPN SBY”.

Yang pertama, selama konsep 'tanah air' ke publik untuk menjadi sebuah ide pemersatu dari perpecahan yang terjadi sebelumnya akibat penjajahan. Tanah dan air menjadi simbol kesuburan, dan lebih luas laut yang memisahkan pulau-pulau menjadi pemersatu dari beragam suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia (Cassidy et al. 2018).

Yang kedua, adalah sejarah panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi pertempuran-pertempuran di wilayah laut, setidaknya terdapat lima perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, diantaranya: Pertempuran Selat Bali, Pertempuran Laut Cirebon, Pertempuran Laut Sibolga, Perlawanan Pasukan ALRI 0032, dan Operasi Anti-Blokade John Lie. Perang ini yang menjadi inspirasi terbentuknya TNI AL yang jauh lebih superior. Puncaknya, ketika tampuk kepemimpinan dan kendali militer Indonesia dipimpin oleh Presiden Sukarno. Hal ini kemudian berlanjut hingga era 80-an pada masa kepemimpinan Presiden Suharto.

Yang ketiga, PM Juanda sebagai inisiator dari langkah Indonesia di dalam UNCLOS untuk mensukseskan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada dua aspek utama yang diperjuangkan pada deklarasi Juanda: perluasan laut teritorial dan Ide Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai negara *archipelago* pada pelaksanaan konvensi hukum laut internasional, mendapatkan banyak kecaman dari negara-negara lain seperti, Amerika Serikat (Smith 2003, 2). Meskipun mendapat banyak kecaman dari negara lain, pejuang Indonesia pada akhirnya juga mendapat dukungan dari negara-negara yang merasa memiliki kesamaan dengan Indonesia seperti Filipina. Yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan bahwa aturan tentang ZEE yang meregulasi 200 mil laut sebagai perairan yang merupakan hak berdaulat dari suatu negara sekaligus jalur laut *archipelago* yang dimiliki Indonesia melalui ALKI I, II, dan III sebagai bagian dari SLOC (DOALOS 1992, 52).

Strategi maritim tidak berjalan lancar pada pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini karena pemerintahan melakukan fokus utama pada supremasi tentara AD dan pembangunan nasional yang hanya berfokus pada daratan. Pada akhir masa pemerintahannya Presiden Soeharto memperkenalkan doktrin maritime, yang disebut sebagai Benua Maritim Indonesia, namun doktrin maritim ini tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada program nyata dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan strategis kemaritiman.

Kegagalan strategi kemaritiman pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian dievaluasi oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui kerangka *Maritime Domain Awareness* (MDA).

”Presiden Gus Dur kemudian menunjuk Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut, kemudian disusul pada tahun 1999 dibentuklah Departemen, Eksplorasi, Laut, yang kemudian saat ini berubah menjadi Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tugas berat diemban oleh

departemen ini mengingati urusan perikanan dan kelautan sempat dipegang sebagai salah satu direktorat jenderal di bawah kementerian perikanan pada masa Orde baru, utamanya dalam mengelola sumber daya laut dan berkaitan dengan *oseanografi*” (Khudori 2010; Susanto 2015, 332).

Pembentukan ini juga mengingatkan kita pada Kementerian Departemen Maritim di akhir Orde lama yang membawahi *Kementerian Perikanan dan Pengolahan Laut* (Kemaritiman 2016).

Beberapa hal menjadi prioritas isu kemaritiman, isu prioritas adalah segala sesuatu yang bersangkutan langsung dengan kepentingan nasional pada wilayah perairan Indonesia. Isu tersebut antara lain, upaya persatuan Indonesia dan strategi dalam menghadapi klaim yang dilakukan oleh negara lain terhadap wilayah laut maupun kepulauan Indonesia.

Penguatan wilayah maritim Indonesia antara lain adalah pembelian *fregat* kelas Ahmad Yani dan kapal selam U-209/1300 buatan Jerman Barat. Kemudian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) MEF yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024. “Kekuatan Pokok Minimum yang akan dicapai adalah pengadaan alutsista 151 KRI, 43 pesawat udara, dan 333 kendaraan tempur yang sudah memiliki teknologi mutakhir, termasuk di dalamnya memprioritaskan pengadaan alutsista dari industri dalam negeri”. Isu prioritas lainnya adalah isu perbatasan di wilayah laut dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Isu ini diangkat karena belajar dari masa lalu dimana lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia.

Perkembangan kemaritiman Indonesia berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dimana melalui diangkatnya Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS adalah diangkatnya beliau sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001 dan kembali diangkat pada Kabinet Gotong Royong pada masa

pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Diangkatnya Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS menjadi upaya Presiden Megawati Soekarnoputri dalam meningkatkan wilayah maritim di Indonesia.

Pada Januari 2002, Husni Manggabarani diangkat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menggantikan Rokhmin Dahuri. Pada periode kepemimpinannya Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah berhasil menyelenggarakan berbagai macam program pembangunan pada wilayah kelautan dan perikanan. Pada Juli 2002, Widi Agoes Pratikto diangkat menjadi Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang ketiga. Pada masa kepemimpinan Widi Agoes Pratikto eksistensi lembaga Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terkenal oleh masyarakat luas dengan melalui media. Melalui Slogan yang diusung adalah TEAMS (*Trust, Empowerment, Aims, Measures, dan Support*). Pada masa kepemimpinannya lahir program Program Kemitraan Bahari Indonesia (PKBI) atau *Sea Partnership Program*. Dengan menggandeng Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga terkait lainnya sebagai upaya untuk pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil (Yanyan M. Yani and Ian Montratama 2015).

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), strategi kemaritiman melalui *asas cabotage* menjadi sinyal positif pada kemajuan pelayaran Indonesia.

“Melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, kemudian diundangkan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penerapan *asas cabotage* ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara serta memberikan kesempatan berusaha bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan” (Republik Indonesia 2008).

Kebijakan ini terbukti berhasil, dengan bertambahnya kapal berbendera Indonesia sebanyak 5.500 kapal, hal ini meningkatkan kapasitas angkut kapal

Indonesia, dimana pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah kapal berbendera Indonesia meningkat menjadi 14 ribu.

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo poros maritim dunia mengalami peralihan, kemaritiman dikenal dikombinasikan dengan konsep pembangunan. Poros maritime dunia pertama kali diperkenalkan pada saat pemilihan presiden 2014. Ide poros maritime dunia menjadi salah satu gagasan unggulan dari pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mulanya ide mengenai poros maritime dunia diutarakan oleh dua akademisi di balik tim kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014 lalu yaitu, Rizal Sukma, direktur CSIS dan pengamat pertahanan Andi Widjajanto yang memperkenalkan gagasan kemaritiman. Visi dan doktrina ini masuk pada salah satu program utama pada Nawacita (Sukma 2014). Gagasan ini kemudian dibawa kembali pada pidato kemenangan Presiden Joko Widodo di atas perahu pinisi “Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta. Menurut para ahli hubungan internasional dan kemaritiman “kebangkitan Indonesia sebagai negara kepulauan,” “harapan baru untuk kebangkitan maritim nasional,” dan “panggilan untuk Persatuan Indonesia” adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari poros maritime dunia. Poros maritim dunia, yang menjadi doktrin maupun visi dari Presiden Joko Widodo bukan merupakan sesuatu hal yang baru, sebelumnya Pemerintah China jauh lebih dulu memperkenalkan konsep Jalur Sutra. Dimana Poros maritime dunia menjadi response atas latar belakang situasi internasional yang menunjukkan signifikansi persaingan ekonomi global (Nainggolan 2015).

“Gagasan Presiden Joko Widodo tentang poros maritime dunia dijelaskan lebih lanjut pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Menurutnya

poros maritime dunia terdiri atas lima pilar meliputi: (1) Budaya maritim, (2) Ekonomi maritim, (3) Konektivitas maritim, (4) Diplomasi maritim, dan (5) Keamanan maritime”. Presiden Joko Widodo melalui lima pilar diatas berupaya untuk menjaring sinergitas dengan negara-negara di Asia Timur dan Jalur Sutra China. Pemaknaan poros maritim dunia, ada yang memahami ‘poros’ sebagai *axis* upaya Indonesia untuk mendekati negara-negara tetangga, ada pula yang memaknai sebagai *fulcrum* upaya Indonesia untuk menjadi mediator di wilayah laut bagi negara-negara besar dan menengah antar kawasan dan atau dipahami sebagai upaya untuk mengamankan dan mengontrol ketat perairan yang telah dibuka sebagai gerbang ekonomi Indonesia (Sulaiman 2017).

Berdasarkan kelima pilar yang telah ada, Presiden Joko Widodo memprioritaskan program “tol laut” yang dilakukan sebagai upaya untuk mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia yang tersebar menjadi banyak pulau-pulau kecil dan pulau besar, konektivitas ini sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi-potensi sumberdaya yang ada di setiap wilayah dapat dijual ke luar wilayah. Kebijakan penanggulangan kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional. Pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia selama ini telah berdampak pada kerugian negara sebesar Rp304 triliun.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo peran negara menjadi semakin aktif dalam mengeksekusi strategi kemaritiman. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berarti menjadi laut sebagai pintu ekonomi Indonesia paling depan, keunggulan ekonomi di wilayah laut dimaksimalkan sebagai upaya untuk menandingi kekuatan ekonomi China di wilayah laut. Pembentukan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman adalah bentuk manifestasi dari upaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi di wilayah laut Indonesia. Fokus utama kementerian ini adalah pada isu pengelolaan sumber daya migas hingga mineral, pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan program “tol laut”, dan juga regulasi perikanan yang di dalamnya menegaskan untuk kembali menegakkan peraturan hukum laut internasional (Republik Indonesia 2015).

Persepsi ancaman yang selama ini menjadi fokus utama strategi maritime sedikit mengalami pergeseran dari geopolitik, kemudian bergeser menjadi geoekonomi. Sehingga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pemerintah berperan menjadi lebih *outward-looking* dalam menjalankan strategi kemaritiman sebagai upaya mewujudkan visi poros maritime dunia. Pergeseran juga terjadi pada visi Indonesia dimana yang pada awalnya mengukuhkan diri sebagai pemimpin ASEAN, saat ini berada pada posisi terdepan dalam hal diplomasi di Asia Tenggara dan menempati posisi istimewa dalam forum negara-negara ASEAN.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengukung kebijakan yang lebih melihat kondisi politik perairan internasional dengan memposisikan diri sebagai kekuatan menengah terkemuka di Indo-Pasifik. Formulasi ini menempatkan Indonesia sebagai negara penyeimbang atau menghubungi negara-negara besar lain di Samudra Hindia dan Pasifik. Misalnya ditunjukkan dengan intensitas keaktifan pada forum kerjasama maritim seperti *Indian Ocean Rim Association (IORA)* dan yang baru saja terbentuk diinisiasi China, *Belt and Road Forum*.

Adanya perubahan strategi dan perubahan kebijakan tidak perubahan citra diri nasional Indonesia. Legasi kejayaan maritim Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan

Majapahit masih menjadi citra diri Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar. Legasi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat diwawancarai, ia menyampaikan bahwa poros maritime dunia harus adalah upaya Indonesia mengembalikan kejayaan masa lalu, dimana para pendahulu kita yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menguasai lautan pada zamannya.

Citra diri positif Indonesia di wilayah maritime juga diiringi dengan citra negatif. Dimana pada masa penjajahan Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia tidak cukup berhasil dalam menerapkan strategi kemaritiman, melalui pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan, Menurutnya, “Indonesia sudah lama memungungi laut dan samudera”. Dari pidato Presiden Joko Widodo diatas mencerminkan bahwa strategi kemaritiman Indonesia selama ini tidak benar-benar menjadi fokus utama pemerintah.

Presiden Joko Widodo merubah sudut pandang Indonesia terhadap posisinya selama ini. Pembangunan hub-ports sebagai upaya mengukuhkan posisi *choke point* Indonesia sebagai negara penghubung di antara dua samudra dan dua benua. Penguhan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk memperlancar alur rute pelayaran yang telah ada dengan meningkatkan frekuensi pelayaran. Hub maritim ini ditegaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2019 dan dioperasionisasikan melalui program “tol laut” (Republik Indonesia 2014). “Strategi maritim pada era poros maritime dunia meliputi tonggak-tonggak sejarah yang mencakup: (1) Penunjukan Menteri Susi dan Pembentukan Satgas 115, (2) Insiden Natuna, (3) Pendekatan Indonesia-Sentris, dan (4) “tol laut”

Empat poin diatas menjadi sebuah kegiatan nyata upaya Indonesia yang didorong oleh Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berperan penting di wilayah laut dalam hal keamanan dan kegiatan ekonomi global.



BAB 3

ANALISIS IDIOSINKRATIK KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERHADAP KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA

3.1 Biografi Presiden Joko Widodo

Joko Widodo merupakan presiden Indonesia ketujuh yang lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta. Jokowi lahir dari pasangan suami istri ayah beliau yang bernama Noto Miharjo dan ibu Sujiatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak laki-laki pertama dari empat bersaudara, pasangan Ketiga adik Jokowi adalah Iit, Sriyantini, Ida Yati dan Titik Relawati. Jokowi mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso Surakarta, selepas dari sekolah dasar kemudian Jokowi melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta, dan kemudian berlanjut hingga sekolah menengah akhir di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Setamatnya dari Sekolah Menengah Atas, kemudian Jokowi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selepas selesai pendidikan di Universitas Gadjah Mada, kemudian Jokowi bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Kertas Kraft Aceh. Setelah tidak bekerja lagi di perusahaan BUMN Jokowi kemudian membuka perusahaan mebel miliknya sendiri dengan Rakabu Sejahtera.

Jokowi menikahi seorang gadis bernama Iriana di usianya yang ke 25. Dari pernikahannya Jokowi dikaruniai tiga orang anak, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Saat ini ketiga anak Jokowi juga meraih kesuksesan yang sama seperti ayahnya, dimana Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Walikota Surakarta, suami dari Kahiyang Ayu atau menantu

Jokowi menjabat sebagai Walikota Medan dan Kaesang Pangarep sukses dengan berbagai macam lini bisnisnya di bidang olahraga dan kuliner. (Kuwado, 2019) (Wibowo, 2021).

3.2 Falsafah Hidup Presiden Joko Widodo Sebagai pemimpin yang berasal dari suku Jawa

Sikap tegas Joko Widodo tercermin pada falsafah Astra brata pemimpin-pemimpin Jawa untuk mengambil sebuah keputusan, hal tersebut merupakan pondasi untuk menganalisis permasalahan dan bagaimana bersikap seperti falsafah pemimpin Jawa Astra brata yang memiliki beberapa Falsafah untuk para pemimpin Jawa antara lain Laku Hambeging Yama

“Pemimpin hendaknya meneladani sikap dan sifat Dewa Yama, dimana Dewa Yama selalu menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi rakyatnya. Harus menindak tegas abadinya, jika mengetahui abadinya itu memakan uang rakyat dan mengkhianati negaranya. Dewa Yama memiliki sifat seperti mendung (awan), mengumpulkan segala yang tidak berguna menjadi lebih berguna. Adil tidak pilih kasih. Bisa memberikan ganjaran yang berupa hujan dan keteduhan. Jika ada yang salah maka akan dihukum dengan petir dan halilintar” (Falsafah Jawa Asta Brata untuk Para Pemimpin, 2015).

Dalam falsafah di atas dapat di analisis sikap tegas presiden Joko Widodo terhadap kebijakan Poros maritim Dunia di ambil dari nilai-nilai luhur orang Jawa yang dimana harus bersikap tegas dan adil untuk kepentingan rakyat dimana pemimpin harus memiliki sikap seperti awan yang mengayomi dan mengumpulkan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi menjadi lebih bermanfaat. Dalam kasus ini peneliti mencoba mengaplikasikan nilai-nilai yang di percaya sebagai seorang pemimpin dalam kasus kebijakan poros maritim. dalam kebijakan Poros maritim dalam upaya pengakuan kedaulatan melakukan penegelaman kapal-kapal asing pencuri ikan yang mendapat respon negatif dari berbagai Negara. (Falsafah Jawa Asta Brata untuk Para Pemimpin, 2015)

“Lamun Siro Sekti Ojo Mateni, Lamun Siro Banter Ojo Ndisiki, Lamun Siro Pinter Ojo Minteri, artinya meskipun kamu sakti jangan suka menjatuhkan. Meskipun kamu cepat jangan suka mendahului, meskipun kamu pintar jangan sok pintar”

Filosofi hidup orang jawa yang menjadi pedoman filosofi hidup Jokowi, orang jawa yang terkenal rendah hati dan tidak berlebihan dalam segala hal menjadi cerminan falsafah hidup Jokowi. Gaya kepemimpinan yang dicerminkan oleh Jokowi Selama ini seperti Gaya pakaian sederhana dan Gaya blusukan yang

membraur dengan masyarakat menjadi pembuktian bahwa hidup sebagai seorang pemimpin negara harus tetap rendah hati dengan tanpa merendahkan orang lain, selain itu fiasafah hidup Jokowi yang di dasarai dari nila-nilai luhur orang-orang Jawa sangat mepengarui kondisi psikologi yang menyeluruh dan membuat sebuah keputusan tersebut menjadi relevan seperi sikap sangat ramah terhadap investasi China di bidang maritim seperti invetasi di bidang insfraktur dan berbagi investasi di bidang maritim, meskipun China memprotes kebijakan Jokowi terhadap penegelaman kapal asaing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. (Jordan, 2019) (Wibowo, 2021).

3.3 Karir Politik Presiden Joko Widodo

Karir politik atau profil politik Presiden Joko Widodo *personality assessment* dan *political personality profile* diantaranya sebagai berikut:

3.3.1 Walikota Surakarta

Joko Widodo sebagi anak laki-laki satu-satunya dari pasangan Noto Mihadjo dan Sujiatmi yang mempunyai tiga saudara perempuan mepengarui kareakter Joko Widodo rasa tanggung jawab yang besar untuk melidungi saudra-saudaraya, jiwa kepemimpinan yang di miliki Joko Widodo diasah sejak kecil karena beliau adalah anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga kecilnya yang memiliki tanggung jawab melidungi dan menjadi contoh terhadap saudara-saudaranya gaya kemepemimpinan yang di miliki Joko Widodo dalam keluarga di apalिकासikan lebih besar lagi. (Kuwado, 2019)

Pada tahun 2010 Jokowi Dodo memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik setelah mendapatkan dukungan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Perjuangan. PDI Perjuangan membentuk koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Joko Widodo maju menjadi calon Walikota Surakarta bersama dengan FX Hadi Rudyatmo. Pada masa-masa awal kampanye elektabilitas dari Joko Widodo masih sangat rendah, hal ini karena masyarakat Surakarta belum cukup mengenal sosok Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo. Joko Widodo cukup tenang menghadapi situasi ini, ia menggunakan strategi *door to door* atau “blusukan” untuk menyapa warga masyarakat satu per satu. Strategi yang dijalankan Joko Widodo bersama tim cukup efektif, ia berhasil mengalahkan pasangan petahana dengan persentase keterpilihan sebesar 36,62%. Ia pun berhasil menduduki jabatan Walikota Surakarta untuk periode pertama. Joko Widodo membangun kota kelahirannya dengan semangat humanis. Penataan kota yang modern dan bermartabat menjadi prioritas Joko Widodo (Wibowo 2021).

Melihat perkembangan kota Surakarta yang begitu pesat serta mendapat banyak dukungan dari masyarakat, Joko Widodo kembali dicalonkan sebagai Walikota Surakarta pada tahun 2010. Partai yang mendukungnya semakin bertambah banyak, yaitu PDI Perjuangan sebagai partai utama, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Kekuatan dukungan masyarakat dibuktikan dengan perolehan suara mencapai lebih dari 90%. Dengan hasil ini, ia pun kembali menjadi Walikota Surakarta untuk kedua kalinya (Wibowo 2021).

3.3.2 Gubernur DKI Jakarta

Pada 2012 Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Dilihat dari sisi pengalaman, kondisi Pilgub DKI Jakarta 2012 hampir

sama dengan Pilwalkot Surakarta 2005, yakni seorang Joko Widodo yang masih minim pengalaman. Pada 2005 Joko Widodo minim pengalaman politik karena berangkat dari latar belakang seorang pengusaha. Pilgub DKI Jakarta disebut sebagai pentas nasional karena posisinya sebagai Ibu Kota Indonesia sekaligus sebagai barometer politik negara. Joko Widodo didukung oleh dua partai yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Ia dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok, seorang mantan Bupati Belitung Timur (Wibowo 2021).

Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli berhasil unggul atas pasangan lainnya dengan perolehan masing masing 42,6% dan 34,05%. Kedua pasangan tersebut berhak melaju ke putaran selanjutnya. Pada saat kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua pertarungan semakin sengit. Gaya “blusukan” Joko Widodo masih digunakan untuk menyapa warga Jakarta. Hingga pada saat hari pemilihan, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama keluar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2012-2017 dengan perolehan suara sebesar 53,82% (Wibowo 2021).

3.3.3 Presiden Indonesia

Dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 dengan dukungan PDIP Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK)

seorang politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar). Meskipun Partai Golkar kala itu mendukung Calon lain. Pemilihan Presiden 2014 merupakan pertarungan *head to head* karena hanya ada dua pasangan Capres-Cawapres, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 merupakan pertarungan yang sangat ketat antar kedua pasangan calon. Hal ini disebabkan karena kedua pasangan calon adalah “calon baru”, tak ada petahana dalam pertarungan Pilpres 2014. Berbagai macam isu mulai bermunculan, dari *negative campaign* hingga *black campaign* (Wibowo 2021).

Pada saat kampanye, Joko Widodo tetap menggunakan gaya lamanya yaitu “blusukan” untuk menyapa masyarakat di seluruh Indonesia. Gaya sederhana dan apa adanya ini mampu memikat hati rakyat Indonesia. Perhitung KPU menyatakan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan perolehan suara 53,15% berbanding 46,85%.³⁴ Dengan hasil ini, maka Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 (Wibowo 2021).

3.4 Trait Analysis Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Gaya kepemimpinan (*Leadership style*) Presiden Joko Widodo dapat di analisis dengan latar belakang beliau yang menjadi anak laki-laki pertama dalam keluarganya dimana dalam lingkup keluarga kecil Joko Widodo beliau harus memberi contoh dan melindungi seluruh saudara-sadara perempuannya, sifat

membiri contoh terhadap saudara perempuannya dapat di katagorikan sikap yang tegas. (Kuwado, 2019) Latar belakang keluarga yang bukan dari keluarga nigrat mencerminkan gambaran pemimpin yang sederhana dan tegas menjadikannya sebagai pemimpin yang kuat dan berkarakter sifat kemimpinya yang didapat presiden Joko Widodo di pengaruhi oleh latar belakang keluarga yang sederhana dimana masa kecil presiden Joko Widodo bukan berasal dari keluarga yang borjuis, (Kuwado, 2019) (Bernstein and Harrington 2011). Pemimpin yang sederhana dicerminkan melalui gaya berpakaian yang sederhana, tidak terlalu mencolok dan kebiasaan “blusukan” yang sering dilakukan pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat menarik banyak simpati dari masyarakat. Sedangkan gaya kepemimpinan tegas ditunjukkan melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan, diantaranya penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, meskipun kebijakan ini mendapat respon negatif dari negara-negara lain, Presiden Joko Widodo tetap konsisten untuk menjalankannya (Wibowo 2021).

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengangkat menteri-menteri untuk membantu menjalankan visi dan misinya, pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merupakan salah satu cerminan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap tegas, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan lintas instansi Presiden Joko Widodo mencoba untuk menunjukkan kekuatan Indonesia di wilayah lautnya, dengan cara menindak tegas kapal-kapal penangkap ikan ilegal dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia dari ancaman pelaku kriminal di laut Indonesia (Nainggolan 2015).

Pada dasarnya undang-undang yang berkaitan dengan penindakan tegas terhadap kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia sudah ada sejak tahun 2008, yaitu UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Penerapan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran belum diterapkan secara maksimal pada tahun sebelumnya. Pertimbangan besar yang menjadi kendala dalam penerapan Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran adalah adanya kecaman dari negara-negara lain. Hal ini terbukti saat Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran diterap oleh Presiden Joko Widodo. Vietnam merasa dirugikan atas penerapan Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, karena banyak kapal-kapal nelayannya yang tertangkap pada saat mencuri ikan di perairan Indonesia dan kemudian di tenggelamkan. Atas kejadian tersebut Vietnam melayangkan protes melalui kedutaan besarnya di Jakarta atas penenggelaman kapal nelayan Vietnam. Vietnam juga melayangkan Nota Diplomatik yang berisi seruan pembebasan bagi nelayan Vietnam yang tertangkap Indonesia. Vietnam menilai tindakan pemerintah Indonesia cenderung diskriminatif, menurutnya Indonesia hanya bersikap tegas terhadap nelayan Vietnam namun tidak terhadap nelayan China yang terbukti melakukan pelanggaran serupa (Nainggolan 2015).

Pemerintah Filipina menjadi negara yang juga merasa tidak sepakat dengan kebijakan Indonesia atas penenggelaman kapal-kapalnya. Pengiriman Nota Diplomatik yang dilakukan Filipina untuk mempertanyakan penenggelaman kapalnya dan nelayannya yang ditangkap Indonesia karena terkena tuduhan melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Pemerintahan Filipina melemparkan tuduhan kepada Indonesia, bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran ketentuan UNCLOS. Pemerintah Indonesia memaklumi hal yang

dilakukan oleh Filipina, karena banyak nelayan Filipina yang tertangkap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia saat menggunakan kapal mereka ataupun menggunakan kapal lain, termasuk yang kapal dengan bendera Indonesia. Filipina menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memperlihatkan respon yang konstruktif terhadap kebijakan poros maritim dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah Filipina tidak memberikan reaksi yang keras atau protes atas kebijakan poros maritime dunia, baik dalam hal penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* maupun agenda pembangunan maritim Indonesia. Presiden Filipina, Aquino menyambut baik kesepakatan Komisi bersama Filipina-Indonesia yang bertujuan untuk bersama memerangi pencurian ikan, Presiden Aquino merespon baik pembangunan sektor maritim Indonesia dengan mengajak pengusaha Filipina untuk menanamkan modal mereka di sektor perikanan dan maritim Indonesia (Nasirin and Hermawan 2017).

Pemerintah Thailand, memberikan respon negatif atas kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Meskipun memberikan respon negatif, namun pada akhirnya Pemerintah Thailand sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja dalam mengatasi *illegal fishing* dengan Indonesia. Langkah Presiden Joko Widodo dan PM Prayut Chan-O-Cha dalam mewujudkan kerjasama untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal teraktualisasikan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 2015. Dalam kerjasama ini Indonesia dan Thailand bersepakat untuk masing-masing nelayan yang tertangkap mendapatkan akses hukum secara jelas sebelum diputuskan bersalah atau tidak (Nainggolan 2015).

Malaysia menyatakan sikap negatif dan sikap positif. Pada awalnya Pemerintahan Malaysia merasa keberatan atas kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*, karena ratusan kapal nelayan berbendera Malaysia tertangkap di wilayah Indonesia saat melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. , Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, menganggap kebijakan Indonesia melanggar kesepakatan kedua negara untuk memulangkan nelayan yang tertangkap saat melakukan pelanggaran wilayah perairan masing-masing. Sikap yang lebih lunak diperlihatkan Kedubes Malaysia di Jakarta, yang secara diplomatis menyatakan menghormati tindakan Pemerintah Indonesia yang melakukan penembakan atau pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal yang telah terbukti di pengadilan melakukan kegiatan *illegal fishing* (Nainggolan 2015).

Negara China telah mengajukan nota protes dengan pengiriman Nota Diplomatik kepada Indonesia. China mempertanyakan tindakan Indonesia dan mengingatkan posisi Indonesia sebagai *flag state*. Menurutnya Indonesia tidak seharusnya berfokus pada penenggelaman kapal-kapal nelayan namun pembangunan infrastruktur Poros Maritim Dunia lebih penting (Nainggolan 2015).

Saat bersamaan China juga memberikan tawaran investasi untuk Indonesia dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur Poros Maritim Dunia, dan menghentikan penangkapan nelayan ilegal di perairan Indonesia. Kapal-kapal nelayan China juga tidak jarang dikawal oleh kapal AL China sehingga seringkali terjadi bentrok antara BAKAMLA dan AL China di wilayah perairan Indonesia (Nainggolan 2015).

Pemerintah China selalu bersikap asertif terhadap kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, Menteri Luar Negeri China, Hong

Lei, secara langsung menyampaikan keprihatinan yang serius, pada Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Susi Pudjiastuti kembali memerintahkan pembakaran/penembakan, dan penenggelaman kapal, yang melibatkan “Gui Xei Yu 12661”, yang telah ditahan dan diproses pengadilan sejak (20 Juni) 2009 (Nainggolan 2015).

Respons dari Australia sejak kebijakan Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo diluncurkan, tidak bersifat reaktif ataupun bernada negatif. Indonesia memandang sikap Australia yang tidak reaktif ataupun bernada negatif dapat membuka peluang kerjasama, khususnya di wilayah di Kota Saumlaki, Pulau Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara menjadi wilayah yang sangat berpotensi untuk menjadi wilayah yang dapat dikerjasamakan untuk pembangunannya, Saumlaki dan wilayah pulau-pulau kecil di sekitarnya telah dapat menikmati buah kerjasama yang baik secara tidak langsung, misalnya dari pelaksanaan Sail Banda dan Sail Morota (Sonta 2016).

Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui *Homeland Security Adviser* Presiden Obama, pada tahun 2014 berupaya mencari informasi lebih lanjut mengenai pengimplementasian konsep poros maritim dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Utusan khusus Obama itu telah berdiskusi lebih lanjut mengenai lalu-lintas manusia di kawasan, pemberantasan terorisme, dan peran *Coast Guards* (Bakamla) di Indonesia (Sonta 2016).

Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal nelayan yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia tidak begitu saja dapat diterima dan dibenarkan oleh negara-negara lain yang bersangkutan. Sikap resisten dari negara-negara lain tidak terlepas dari upaya mewujudkan

kewajiban negara tersebut untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Sikap resisten dari negara-negara ASEAN adalah bentuk bahwa kondisi negara-negara ASEAN yang mudah terbawa oleh sikap resisten, meskipun dewasa ini sudah semakin membaik (Nasirin and Hermawan 2017).

Merespon hal-hal diatas Presiden Joko Widodo mengupayakan upaya diplomasi namun tetap mengusung sikap tegas, sebagai bentuk lanjutan dari konsistensinya dari awal untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam mengelola wilayah lautnya. Respon-respon negatif dari negara-negara tetangga adalah imbas dari kebijakan ataupun keputusan yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo.

3.5 Cognitive Analisis Gaya Pengambilan Keputusan Presiden Joko Widodo dalam Politik Luar Negeri Poros Maritim Dunia

Gaya pengambilan keputusan atau *decision making style* Presiden Joko Widodo dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia terkhusus dalam upaya mengarahkan Indonesia untuk menjadi poros maritime dunia diaktualisasikan melalui prioritas kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelautan (*National Ocean Policy*) yang memuat program atau rencana pembangunan kelautan Indonesia dan arah kebijakan strategi kelautan nasional (Bernstein and Harrington 2011).

Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penegakkan hukum di wilayah maritim Indonesia menjadi prioritasnya pada periode pertama kepemimpinannya. Hal ini dilatarbelakangi analisis dari orang-orang terdekat pemerintah Presiden Joko Widodo. Dimana terdapat dua faktor, yang pertama, melihat minimnya pembangunan infrastruktur di kawasan maritime Indonesia untuk kedepan ini dapat menjadi ancaman bagi Indonesia, selain itu

upaya memaksimalkan potensi ekonomi akan terhambat apabila infrastruktur penunjang ekonomi tidak tersedia di kawasan maritime Indonesia. Kedua, terkait dengan lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan maritim Indonesia, Presiden Joko Widodo melihat bahwa pembangunan wilayah maritime Indonesia harus didukung oleh dua faktor utama ini, pembangunan infrastruktur dan pembangunan kualitas SDM. Kedua permasalahan yang krusial dihadapi negara dan bangsa ini tidak dapat dipisahkan, karena sesungguhnya menyangkut sarana, fasilitas, atau alat, dan, satu lagi, orang atau faktor manusia yang melakukan atau yang menjadi kekuatan di belakangnya (Wibowo 2021).

Dalam upaya percepatan pembangunan kawasan maritim, Indonesia mengalami keterbatasan permodalan dalam pembangunan infrastruktur dan keterbatasan kemampuan dalam pengembangan SDM, sehingga keterlibatan pihak (negara) asing dalam kedua hal tersebut sangat diperlukan. Oleh karena dua faktor tersebut agenda poros maritim dunia tidak hanya pada aspek penegakkan hukum diwilayah laut Indonesia, namun juga upaya untuk menarik investasi dari negara lain (Nainggolan 2015).

“Pada beberapa agenda Poros Maritim Dunia, pada saat kunjungan ke negara lain dan di berbagai forum internasional, Presiden Joko Widodo selain berupaya menyampaikan penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia, juga menyampaikan peluang kerjasama antara negara dengan Indonesia, khususnya dalam bidang investasi. Negara-negara dari dalam maupun luar kawasan seperti China, Korea Selatan, dan Australia menunjukkan minat mereka yang tinggi untuk berinvestasi di sektor maritim Indonesia, dengan nilai investasi mencapai 9,34 miliar dolar AS. Terhadap pembangunan infrastruktur laut, khususnya “tol laut”. Pemerintah China telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi sebesar 2 milyar dolar AS.38 Dua BUMN China telah menandatangani MOU dengan BUMN Indonesia, sebagai hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada tahun 2015. Ketertarikan dari Pemerintah China tidak terlepas dari upaya pengembangan proyek Jalur Sutra Maritim abad ke 21 miliknya. Sebaliknya, Jepang menyatakan masih ingin mendalami lebih jauh proyek “tol laut” yang ditawarkan itu, pihak swasta China telah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara. Ini sudah merupakan kemajuan besar, setelah sebelumnya ditandatangani MOU. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani itu mencakup pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, pelabuhan, jalan kereta api, tol, serta pengolahan perikanan dan pertanian. Jumlah investasi yang akan dikucurkan pihak swasta China untuk proyek pengembangan infrastruktur, terutama laut, selama 10 tahun itu mencapai Rp. 35 triliun” (Nainggolan 2015).

Presiden Joko Widodo, melalui kunjungan perdananya untuk perkenalan dan sekaligus mengundang investasi asing, memperoleh sambutan antusias Pemerintah China. Paling sedikit, tercatat 8 investor asal China yang berminat menanamkan investasi untuk proyek-proyek galangan kapal (Nainggolan 2015). Respon positif China terhadap pembangunan wilayah maritim Indonesia tidak terlepas dari paya China untuk mengembakan Jalur Sutera Maritim China yang berlatar belakang (klaim) sejarah, walaupun dimodifikasi di sana-sini, disesuaikan dengan kepentingan pragmatis China dewasa ini, sempat mengundang kritik dari pihak Indonesia. China bersikap positif dan berusaha mengambil manfaat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan dampak positif terhadap Jalur Sutra Maritim China, sedangkan bersikap negatif terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan, seperti penenggelaman kapal. (Nainggolan 2015).

Menurut pihak TNI AL, pada beberapa kesempatan di dalam forum internasional TNI AL menyampaikan visi pemerintahan baru Indonesia, tidak semua negara pemerintahan memberikan sikap terhadap kebijakan Indonesia yang sudah diimplementasikan oleh menteri Susi Pudjiastuti di perairan Indonesia. Karena, negara-negara lain juga melakukan hal yang serupa, seperti yang dilakukan oleh AL Malaysia yang memotong (*scrapping*) kapal pelaku *illegal fishing* di wilayahnya. Bahkan, dalam beberapa kasus sebelum ini, tindakan Pemerintah Australia lebih keras lagi, dengan membakar dan menenggelamkan kapal

pelakunya, tanpa peduli dengan nasib orang-orang di dalamnya para nelayan dan nakhoda kapal dipaksa keluar dari kapal dan berenang mencari selamat masing-masing. Bedanya kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal di Australia dengan di Indonesia, di Indonesia, proses penembakan/pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal dilakukan dengan mengundang para wartawan, untuk memperoleh publisitas yang luas (Nainggolan 2015).

Presiden Joko Widodo melihat proyek Poros Maritim Dunia tidak hanya dari satu sisi, sikap tegasnya terkadang juga berubah menjadi sikap diplomatis yang dapat menguntungkan Indonesia. Presiden Joko Widodo melihat potensi investasi dari China yang dapat mendorong percepatan pembangunan Poros Maritim Dunia (Nainggolan 2015).

Upaya diplomasi maritim yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mendapatkan tiga kepentingan Indonesia, yaitu: Pertama, dimensi kedaulatan, Presiden Joko Widodo melihat kedaulatan Indonesia di masa depan akan terganggu apabila tidak adanya pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan seluruh wilayah di Indonesia, terkhusus wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain, sehingga dengan upaya diplomasi maritim Presiden Joko Widodo mencoba menarik investasi dari negara lain untuk mendorong pembangunan infrastruktur di jalur "tol laut" Indonesia (Afriansyah 2016).

Kedua, Dimensi Keamanan, dimensi kemasam coba diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo, melalui diplomasi dengan Amerika Serikat dan Jepang dalam upaya meningkatkan kapasitas teknologi AL Indonesia dan Baklam, sebagai penjaga wilayah perairan Indonesia (Afriansyah 2016).

Ketiga, Dimensi kesejahteraan, jalur “tol laut” yang menjadi salah satu gagasan Presiden Joko Widodo dalam program Poros Maritim Dunia. “tol laut” sebagai upaya untuk memangkas biaya-biaya logistik di wilayah Indonesia, menurutnya, dengan pembangunan “tol laut” maka akan memangkas biaya operasional usaha di Indonesia yang selama ini selalu tinggi dan memakan waktu yang lama. “tol lau” berperan penting dalam jalur perekonomian Indonesia, sebagai jalur yang mengkoneksikan antar wilayah di Indonesia (Afriansyah 2016).

Tiga dimensi di atas menjadi sedikit bukti konsistensi Presiden Joko Widodo terhadap keputusan yang diambilnya dari awal pemerintahannya pada tahun 2014 hingga 2019.

3.6 Dinamika Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Tentang Poros Maritim Dunia

1. *Adjustment Changes* yaitu perubahan yang dilakukan dalam upaya penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. Perubahan ini hanya mengarah pada metode atau strategi dari kebijakan luar negeri, dan tanpa merubah tujuan utama kebijakan luar negeri.(Blankenbaker 2016).

Perubahan kebijakan luar negeri yang didasari oleh *Adjustment Changes* pada dasarnya hanya pada ruang lungku usaha yang lebih besar dalam mencapai tujuan besar dari kebijakan luar negeri yang sama dengan sebelumnya. Jika melihat kebijakan luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun pada dasarnya tujuan dari kebijakan ini tetap sama namun, cara untuk mencapai tujuan besar ini yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kepemimpinan. Perubahan *Adjustment Changes* pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terasa, dimana usaha yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam

mencapai poros maritime dunia lebih besar jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya (Blankenbaker 2016).

2. *Program Changes* yaitu perubahan ini mengarah pada perubahan program kerja dari kebijakan luar negeri. Perubahan ini umum terjadi, karena perubahan situasi dan kondisi yang ada menuntut perubahan atas program-program yang tidak berjalan dengan baik (Blankenbaker 2016).

Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia tentang poros maritim dunia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo jika berkaca pada teori *Program Changes* terjadi permasalahan tentang pencurian ikan secara ilegal. Permasalahan tentang pencurian ikan secara ilegal ini yang mendasari kebijakan pemerintah tentang upaya pencegahan *illegal fishing* di Indonesia diantaranya juga melalui kebijakan dalam negeri dengan penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia (Kosadi 2018).

3. *Problem/Goal Changes* yaitu perubahan ini mengarah pada perubahan yang lebih besar, dimana perubahan terjadi pada arah atau tujuan kebijakan atau perubahan orientasi pada kebijakan luar negeri. Perubahan ini didasari oleh perubahan tujuan atau orientasi kebijakan luar negeri, tujuan dari arah kebijakan luar negeri yang sudah tidak relevan maka akan segera diubah (Blankenbaker 2016). Sejauh ini perubahan kebijakan luar negeri Indonesia tentang poros maritime dunia belum mengalami pergeseran tujuan, hal ini dikarenakan tujuan besar untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritime dunia masih sesuai dengan kebutuhan Indonesia di dunia internasional (Kosadi 2018).
4. *International Orientation Changes* yaitu yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perubahan pada orientasi internasional pada kebijakan luar negeri.

Perubahan kebijakan luar negeri yang didasari oleh faktor ini *International Orientation Changes* membuat perubahan yang mendasar peran negara dalam aktivitas internasional. Hal ini terlihat pada bukan hanya satu kebijakan saja, melainkan banyak yang kurang atau lebih secara bersamaan berubah Hermann, 1990 dalam (Blankenbaker 2016).

Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia tentang poros maritim dunia yang didasari oleh teori *International Orientation Changes* ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana yang sebelumnya poros maritime dunia hanya pada pembahasan pada aspek keamanan dari ancaman-ancaman luar atau geopolitik sekarang berkembang pada aspek ekonomi atau geoekonomi. Presiden Joko Widodo melihat laut Indonesia tidak hanya pada aspek ancaman, namun juga melihat adanya peluang ekonomi yang besar di wilayah laut Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan luar negerinya tidak hanya berfokus pada geopolitik tetapi juga geoekonomi (Kosadi 2018).

BAB 4

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Poros maritim dunia, sebagai gagasan yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya tahun 2014-2019. Implementasi atas gagasan poros maritime dunia paling tidak berfokus pada dua hal besar, yaitu “tol laut” dan penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia melalui penenggelaman kapal nelayan pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan tersebut mengundang respon negatif dan respon positif, respon negative dilakukan oleh negara-negara lain, seperti China, Thailan, Vietnam dan Malaysia. Sedangkan respon positif muncul dari dalam negeri.

Presiden Joko Widodo paham akan kebijakan poros maritime dunia pasti akan membawa respon dari berbagai pihak, sehingga kebijakan ini tetap terus berjalan meskipun mendapatkan kecaman dari negara-negara lain. Tindakan tegas dan upaya pembangunan di wilayah maritim Indonesia menjadi gambaran umum atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam poros maritime dunia.

Berbagai langkah dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo tidak terlepas dari karakternya sebagai pemimpin politik, kebijakan Presiden Joko Widodo didorong oleh tiga factor, yang pertama, latar belakang profil politiknya

yang terkenal sederhana dan tegas dan bercita-cita untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan rakyatnya, kedua, gaya pengambilan keputusan, sebelum terjun ke dunia politik Presiden Joko Widodo adalah seorang pengusaha, sehingga keputusannya akan merasakan keuntungan, melihat kerugian yang diderita Indonesia selama ini atas tindakan pencurian ikan oleh nelayan asing, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan memberikan efek jera melalui penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Yang ketiga, gaya kepemimpinan, citra sederhana dan tegas yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo mendorong kepemimpinannya pada isu poros maritim dunia, konsisten dijalankan meskipun mendapat kecaman dari negara-negara lain.

5.2 Rekomendasi

Dengan kebijakan yang kondusif, agenda Poros Maritim Dunia akan memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat, aturan pencegahan melalui UU harus diperkuat, Secara khusus, upaya kerjasama investasi yang melibatkan investor asing harus sepenuhnya berdampak positif terhadap perekonomian bagi masyarakat di kawasan sekitar, terutama masyarakat kawasan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Blankenbaker, SarahAfriansyah, Arie. 2016. "Indonesia ' s Practice in Combating Illegal Fishing : 2015 – 2016" 22: 2015–16. <https://doi.org/10.1163/9789004379633>.
- Bernstein, Blanche, and Michael Harrington. 2011. "The New American Poverty." *Political Science Quarterly* 100 (1): 139. <https://doi.org/10.2307/2150864>.
- Blankenbaker, Sarah. 2016. "Idiosyncratic Perspectives." *Anyone Corporation* 31 (31): 75–81.
- Cassidy, Fikry, Partogi J.P. Samosir, Debbi Oktarossa, Erry Wahyu Prasetyo, Faiz Ahmad Nugroho, Widya Fitri, Robertus Aji Putro, et al. 2018. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 11.
- Indrawati, Indrawati, and Agung Yudistira Nugroho. 2019. "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]." *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 10 (20): 14. <https://doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462>.
- Jones, Lawrence. 2015. "THOMAS HARDY ' S " IDIOSYNCRATIC REGARD " MODE" 42 (3): 433–59.

- Junef, Muhar. 2019. "Implementasi Poros Maritim Dalam Perspektif Kebijakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (3): 303. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.303-322>.
- Kosadi, Budy P. Resosudarmo and Ellisa. 2018. "Illegal Fishing War: An Environmental Policy During the Jokowi Era?"
- Kusumawardhani, Indriati, and Arie Afriansyah. 2019. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dan Diplomasi Maritim." *Kertha Patrika* 41 (3): 255.
- Laksono, Dinda Arumsari. 2018. "Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7 (3): 58–70. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi73b2516703full.pdf>.
- Lisbet, Adorini Pujayanti, and Rizki Roza. 2019. *Diplomasi Indonesia Dan Pembangunan Konektivitas Maritim*.
- Madu, Ludiro. 2018. "Urgensi Indian Ocean Rim Association (IORA) Dalam Diplomasi Maritim Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies* 2 (2): 171. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.5>.
- Mière, Christian Le. 2018. "Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges." *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*, 1–148. <https://doi.org/10.4324/9780203555590>.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2015. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya (Maritime Axis Policy and Its International Implications)." *Politica* 6: 167–90.
- Nasirin, Chairun, and Dedy Hermawan. 2017. "Kontroversi Implementasi

- Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia.” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12 (1): 9. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610>.
- Nurhayati, Atikah, Isah Aisah, and Asep K. Supriatna. 2019. “Strengthening the Global Maritime Fulcrum Concept through the Inclusion of the Bioecoregion Connectivity Aspect.” *WSEAS Transactions on Environment and Development* 15: 46–56.
- Sonta, Ahrie. 2016. *Regions and Powers: The Structures of International Security*. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 2. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.42>.
- Wibowo, Yovie Ar Razzaq. 2021. “Gaya Kepemimpinan Joko Widodo - Presiden Republik Indonesia.” *ResearchGate*, no. June. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32632.57602>.
- Yanyan M. Yani, and Ian Montratama. 2015. “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik.” *Jurnal Pertahanan* 5 (2): 25–51.
- . 2016. “Idiosyncratic Perspectives.” *Anyone Corporation* 31 (31): 75–81.
- Cassidy, Fikry, Partogi J.P. Samosir, Debbi Oktarossa, Erry Wahyu Prasetyo, Faiz Ahmad Nugroho, Widya Fitri, Robertus Aji Putro, et al. 2018. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 11.
- Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik, and Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2019. “Lima Tahun Maju Bersama.”
- Jones, Lawrence. 2010. “Jurnal Kepemimpinan” 1 (1): 10–48.
- Junef, Muhar. 2019. “Implementasi Poros Maritim Dalam Perspektif Kebijakan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (3): 303.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.303-322>.

- Kusumawardhani, Indriati, and Arie Afriansyah. 2019. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dan Diplomasi Maritim." *Kertha Patrika* 41 (3): 255.
- Laksono, Dinda Arumsari. 2018. "Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7 (3): 58–70. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi73b2516703full.pdf>.
- Lisbet, Adorini Pujayanti, and Rizki Roza. 2019. *Diplomasi Indonesia Dan Pembangunan Konektivitas Maritim*.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2015. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya (Maritime Axis Policy and Its International Implications)." *Politica* 6: 167–90.
- Nurhayati, Atikah, Isah Aisah, and Asep K. Supriatna. 2019. "Strengthening the Global Maritime Fulcrum Concept through the Inclusion of the Bioecoregion Connectivity Aspect." *WSEAS Transactions on Environment and Development* 15: 46–56.
- Syahrin, MANajeriAl. 2018. "Kebijakan Poros Maritim Jokowi Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan Keamanan Laut Indonesia." *Indonesian Perspective* 3 (1): 1. <https://doi.org/10.14710/ip.v0i0.20175>.
02. Wibowo, Yovie Ar Razzaq. 2021. "Gaya Kepemimpinan Joko Widodo - Presiden Republik Indonesia." *ResearchGate*, no. June. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32632.576>
- Yanyan M. Yani, and Ian Montratama. 2015. "Indonesia Sebagai Poros Maritim

Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik.” *Jurnal Pertahanan* 5 (2): 25–51.

<https://news.detik.com/berita/d-4565415/jokowi-ungkap-filosofi-jawa-pegangannya-meski-sakti-jangan-suka-menjatuhkan>

